

**PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF
MELALUI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
(Studi Pada DPC PKB Kabupaten Pesawaran, Lampung)**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

SARHANI
NPM : 1321020077

Program Studi : Siyasah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

ABSTRAK

Perubahan sistem pemilihan tidak langsung ke sistem pemilihan langsung membuat ruang politik menjadi semakin kompetitif. Setiap partai politik mempunyai mekanisme sendiri dalam proses pencalonan anggota sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya. PKB dalam menentukan bakal calon anggota legislatif, terlebih dahulu mengadernya agar mampu menjadi sosok calon pemimpin yang berkualitas dan memiliki karakter yang khas dibanding calon dari partai yang lain. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan umum sekarang ini, masih banyak masyarakat yang tidak mau berpartisipasi aktif untuk mengawasi aktivitas partai politik dalam menetapkan bakal calon legislatif. Bahkan ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Ini karena masyarakat sudah mulai apatis dan tidak mempercayai janji-janji dari calon yang dianggap hanya menjual visi dan misi saat pemilu.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penetapan bakal calon anggota legislatif DPC PKB Kabupaten Pesawaran, dan bagaimana perspektif fikih siyasah terhadap penetapan bakal calon anggota legislatif DPC PKB Kabupaten Pesawaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penetapan bakal calon anggota legislatif melalui partai politik pada DPC PKB Kabupaten Pesawaran dan kemudian menganalisisnya menurut perspektif fikih siyasah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Pengolahan analisis data penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penetapan bakal calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPC PKB di Kabupaten Pesawaran, menggunakan sistem terbuka, karena peluang dibuka kepada siapa saja yang ingin mendaftarkan diri menjadi bakal calon anggota legislatif dari PKB di Kabupaten Pesawaran. Tahapan dalam penetapan bakal calon dilakukan dengan proses rekrutmen terbuka, seleksi berkas administratif, wawancara, proses penetapan, dan pendaftaran. Ada beberapa syarat khusus bagi bakal calon, diantaranya yaitu beriman, dan mengakui Pancasila sebagai dasar Negara, siap memperjuangkan aspirasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, siap mengibarkan bendera PKB, dan siap membela rakyat, juga siap membela yang benar. Berdasarkan syarat dan tahap tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan bakal calon anggota legislatif di DPC PKB Kabupaten Pesawaran dilakukan sesuai dengan konsep dalam fikih siyasah, karena bertujuan untuk menjaring sosok pemimpin yang baik, jujur, adil, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemersatu umat.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukaramé, Bandar Lampung (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENETAPAN BAKAL CALON
ANGGOTA LEGISLATIF MELALUI
PARTAI POLITIK PERSPEKTIF
FIKIH SIYASAH (Studi pada DPC
PKB Kabupaten Pesawaran, Lampung)**

Nama Mahasiswa : Sarhani

NPM : 1321020077

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar'iiyyah)**

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. Susiadi AS. M.Sos.I

NIP. 195808171993031002

Pembimbing II

Frenki, M.Si

NIP.198003152009011017

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF
MELALUI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH** (Studi pada DPC PKB Kabupaten Pesawaran,
Lampung) disusun oleh Sarhani, NPM. 1321020077 Jurusan
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam
sidang munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Nurnazli, M. Ag.

Sekretaris : Gatot Bintoro Putro Aji, M. E. Sy.

Penguji 1 : Agustina Nurhayati, S. Ag., M. H.

Penguji 2 : Drs. Susiadi AS. M. Sos. I.

Penguji 3 : Frenki, M. Si.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Khairuddin, M. H.

NPM. 196210221993031002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa[4]: 59)*¹



*Q.S. An-Nisa[4]: 59.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesaikannya skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rohani (alm) dan Ibu Sarti (alm).

Terimakasih telah menjadi penyemangat dalam segala aktifitas dalam hidupku, terutama dalam menuntut ilmu.

2. Teteuku tersayang (Ina Nila Nurlaila) beserta suami (Kak Oji), dan keponakan Aa yang tersayang (Siti Hana Sofiyah, Dian Safitri, Rosi Septiana Putri dan M. al-Faris Adnan) yang selalu menjadi penyemangat aa sarhan dalam menempuh pendidikan, semoga kalian menjadi anak sholeh, beserta keluarga besarku yang telah mendukungku.

3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Sarhani dilahirkan di Pekon Ulok Muki, kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 11 Agustus 1993. Anak kedua dari dua bersaudara, buah cinta kasih pasangan Rohani (alm) dan Sarti (alm).

Menempuh pendidikan berawal dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Sumber Agung selesai pada tahun 2007. Melanjutkan sekolah menengah tingkat pertama di SMP Negeri 1 Ngambur selesai pada tahun 2010. Pendidikan sekolah menengah atas ditempuh di SMA Negeri 1 Ngambur selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Siyasah.

Selama menjadi mahasiswa, pernah aktif di beberapa kegiatan intra kampus. Pada tahun 2015 menjabat sebagai Bendahara Umum BEM UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala nikmat Allah SWT, yang telah memberi kesehatan, kelapangan berfikir, serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penetapan Bakal Calon Anggota Legislatif Melalui Partai Politik Perspektif Fikih Siyasah (Studi Pada DPC PKB Kabupaten Pesawaran, Lampung)”**. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Siyasah, di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari berbagai motivasi, bantuan pemikiran, dukungan materil dan moril, serta partisipasi dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Prodi Siyasah, Dr, Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
4. Drs. Susiadi AS.M.Sos.I. selaku pembimbing I, dan Frenki, M.Si. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan pengetahuan, arahan, dan membimbing dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Tim Penguji Munaqasyah,
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
7. Pengurus DPC PKB Kabupaten Pesawaran, yang menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
8. Saudara-saudaraku, bibi dan paman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala motivasi dan dukungan yang selalu diberikan, sehingga saya selalu bersemangat dalam menyelesaikan proses perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan di PMII Rayon Fakultas Syariah.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Amin.

Bandar Lampung, 2019

Penulis

Sarhani

NPM. 1321020077

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan dan Kegunaan.....	7
G. Signifikasi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian	8
BAB II PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA PERWAKILAN MENURUT FIKIH SIYASAH	
A. Kajian Teori.....	14
B. Tinjauan Pustaka.....	46
BAB III PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF KABUPATEN PESAWARAN MELALUI PARTAI PKB	
A. Profil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	49
B. Struktural DPC PKB Kabupaten Pesawaran	61
C. Dasar Penetapan Bakal Calon Anggota Legislatif DPC PKB Kabupaten Pesawaran	62

D. Mekanisme Penetapan Bakal Calon Anggota Legislatif Melalui DPC PKB Kabupaten Pesawaran.....	63
---	----

BAB IV PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF MELALUI PARTAI POLITIK

A. Penetapan Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pesawaran Melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).....	75
B. Tinjauan Fikih Siyasaah Terhadap Penetapan Bakal Calon Anggota Legislatif Melalui Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pesawaran	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut pada skripsi ini terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian istilah-istilah pada judul guna mendapat gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, yaitu : “Penetapan Bakal Calon Anggota Legislatif Melalui Partai Politik Perspektif Fikih Siyasah (Studi Pada DPC PKB Kabupaten Pesawaran, Lampung)”.

Adapun beberapa istilah yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

Bakal calon adalah orang yang akan dijadikan calon untuk diusulkan menjadi sesuatu.¹

Anggota legislatif adalah anggota yang berwenang dalam membuat undang-undang.²

Partai politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan politik tertentu.³

Fikih siyasah adalah fikih tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia dan negara berupa hukum, peraturan, kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam untuk mewujudkan kepentingan orang banyak.⁴

Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (selanjutnya akan disebut DPC PKB) adalah suatu dewan eksekutif pada partai PKB yang terdiri

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 239.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid.*, h. 803.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid.*, h. 1024.

⁴ Ahlin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 46.

dari sejumlah orang yang menjalankan program dan mengendalikan roda organisasi di tingkat cabang.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, yang dimaksud dengan judul ini adalah upaya pengkajian secara mendalam tentang penetapan bakal calon anggota legislatif melalui partai politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pesawaran ditinjau dari perspektif fikih siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul ini adalah:

1. Alasan Objektif
 - a. Pemilihan anggota legislatif menjadi momen yang sangat penting bagi demokrasi di Indonesia. Penetapan bakal calon anggota legislatif merupakan tahap awal yang menjadi penentu baik buruknya pemerintahan mendatang.
 - b. Partai politik harus obyektif dalam menetapkan bakal calon anggota legislatif. Akan tetapi banyak oknum partai politik yang menetapkan bakal calon dengan berorientasi kepada seberapa besarnya kontribusi yang diberikan oleh bakal calon tersebut, bukan berorientasi pada kualitasnya.
2. Alasan Subjektif
 - a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syari'ah.

- b. Literatur cukup tersedia dan mendukung referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem rekrutmen pejabat politik dari sistem pemilihan tidak langsung ke sistem pemilihan langsung membuat ruang politik menjadi semakin kompetitif. Penerapan sistem kompetisi langsung memungkinkan makin banyaknya preferensi kandidat yang bersaing dalam jabatan-jabatan politik.⁵

Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil. Dilihat dari sisi proses pemilu dikatakan berkualitas jika pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman, tertib, dan lancar. Sedangkan dilihat dari sisi hasil, pemilu dikatakan berkualitas jika menghasilkan pemimpin negara yang mampu menyejahterakan rakyat, serta mengangkat harkat dan martabat bangsa.⁶

Berkualitasnya pemilu dari sisi hasilnya, berawal pada proses pencalonan, baik berkaitan dengan persyaratan maupun mekanisme pencalonannya. Penentuan bakal calon legislatif baik DPR maupun DPRD bermula dari suatu proses di internal Partai Politik peserta pemilu. Partai politiklah yang mengusulkan bakal calon untuk setiap daerah pemilihan sehingga ia memiliki peran yang sangat besar dalam siklus kepemimpinan

⁵ Siti Zuhro, dkk, *Peran Aktor Dalam Demokratisasi*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), h. 8.

⁶ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 182.

dalam pengelolaan negara.⁷ Walaupun undang-undang menentukan persyaratan formal yang harus dipenuhi seorang bakal calon, namun secara substansial, partai politik yang bersangkutanlah yang lebih mengetahui kualitas kadernya untuk dapat dicalonkan. Ini karena partai politiklah yang telah melakukan pembinaan terhadap kader-kadernya dalam waktu yang cukup lama.⁸

Setiap partai politik mempunyai mekanisme sendiri dalam proses pencalonan anggota sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya. Menurut Cheppy Haricahyono, berbicara partai politik setidaknya menyangkut tiga pihak. Pertama, massa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang lain, yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara normatif, dan tingkat kesetiaan terhadap partai tidak benar-benar mengakar. Kedua, *the professional workers* yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai. Dan yang ketiga, sekelompok elite partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan garis kebijaksanaan partai. Pada umumnya, masing-masing partai politik memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda-beda. Karakteristik yang dimaksud adalah keanggotaan, organisasi dan administrasi, arah dan tujuan, serta berbagai sumber lain yang menyangkut dana, kecakapan, kekuatan pemilih, calon-calon yang kharismatik, dan lain sebagainya.⁹

⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018) h. 180.

⁸ *Ibid*, h. 182-183.

⁹ Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), Cet. Ke-2, h. 191.

Firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa'[4]: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁰
(Q.S. An-Nisa'[4]: 59)

Ayat tersebut menerangkan bahwa kita harus mentaati Allah, Rasul, dan Ulil Amri atau pemegang urusan pemerintahan. Ini berarti bahwa kita harus mempersiapkan pengganti atau penerus estafet kepemimpinan dengan orang yang terbaik, memiliki keimanan yang kuat, dan siap untuk mengamalkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Sehingga membutuhkan sebuah manajerial yang baik dalam menentukan bakal calon anggota legislatif.

Proses penetapan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimulai melalui seleksi internal Partai Politik peserta pemilu. Seleksi ini dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik yang bersangkutan. Berdasarkan hasil seleksi, Partai Politik peserta pemilu yang bersangkutan menyusun daftar bakal calon. Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat provinsi, dan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2004), h. 87.

ditetapkan oleh pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota.¹¹

Salah satu partai politik yang ikut serta dan andil dalam pemilu adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Pada partai ini, bakal calon anggota legislatif terlebih dahulu dikader agar mampu menjadi sosok calon pemimpin yang berkualitas dan memiliki karakter yang khas dibanding calon dari partai yang lain. Ini dilakukan sesuai dengan AD/ART partai, khususnya dalam penelitian ini adalah pada DPC PKB Kabupaten Pesawaran.

Meskipun penetapan bakal calon anggota legislatif oleh partai politik telah dilakukan dengan berdasar pada AD/ART partai dan dikader sebaik mungkin, tapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan pemilihan umum sekarang ini, semakin banyak masyarakat yang tidak mau berpartisipasi aktif mengawasi aktivitas partai politik dalam menetapkan bakal calon legislatif, bahkan ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Ini karena masyarakat sudah mulai apatis dan tidak mempercayai janji-janji dari calon yang dianggap hanya menjual visi dan misi saat pemilu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, akan diadakan pengkajian secara mendalam tentang penetapan bakal calon anggota legislatif melalui partai politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pesawaran ditinjau dari perspektif fikih siyasah.

¹¹ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif*, h. 187-188.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah memfokuskan pada pelaksanaan penetapan bakal calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik, baik dalam persyaratan calon, proses perekrutan, hingga penetapannya. Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah DPC PKB Kabupaten Pesawaran.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan bakal calon anggota legislatif DPC PKB Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana perspektif fikih siyasah terhadap penetapan bakal calon anggota legislatif DPC PKB Kabupaten Pesawaran?

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui sistem penetapan bakal calon anggota legislatif melalui partai politik pada DPC PKB Kabupaten Pesawaran.
 - b. Untuk mengetahui penetapan bakal calon anggota legislatif melalui partai politik pada DPC PKB Kabupaten Pesawaran perspektif fikih siyasah.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang penetapan bakal calon anggota legislatif melalui partai politik, khususnya pada DPC PKB Kabupaten Pesawaran.

- b. Sebagai syarat khusus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Pentingnya dalam melakukan penelitian ini adalah agar masyarakat mengerti berbagai persyaratan dan prosedur yang dilakukan dalam penetapan bakal calon anggota legislatif khususnya pada DPC PKB, sehingga masyarakat bisa memberi penilaian sendiri terhadap bibit-bibit bakal calon anggota legislatif yang benar-benar memiliki kompetensi dan mampu mengemban tugas sebagai anggota legislatif nantinya.

H. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, digunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan, dan menganalisa data. Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹² Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

¹² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*)¹³, dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari pengurus DPC PKB Kabupaten Pesawaran.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti.¹⁴ Penelitian deskriptif atau deskripsi ini berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu.¹⁵ Kekhususan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi saat ini dan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan di analisis. Sehubungan dengan permasalahan skripsi ini adalah tentang penetapan bakal calon anggota legislatif melalui partai politik, khususnya pada DPC PKB Kabupaten Pesawaran, Lampung.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus DPC PKB Kabupaten Pesawaran. Dari

¹³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996) Cetakan 7, h. 81.

¹⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47.

¹⁵ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 8.

populasi 51 orang pengurus DPC PKB Kabupaten Pesawaran, sampel yang diambil untuk dijadikan narasumber adalah 6 orang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer.

Sumber data sekunder ini berupa buku Fikih, Siyasah, jurnal, dan artikel.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Menurut Winarno Surahmat dalam bukunya yang berjudul “Dasar dan teknik *research* pengantar metodologi ilmiah”, ia memberikan pedoman sebagai berikut: “ Apabila populasi cukup homogeny (serba sama), terhadap populasi dibawah 100 dapat dipergunakan sampel 50%, di atas 1.000 sebesar 15%.¹⁷

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut di atas. Bila populasi besar, dan penelitian tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi, missal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, mak penelitian dapat

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 80.

¹⁷ Susiadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), h. 10.

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Menentukan sampel menggunakan teknik *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Jika penelitian tentang kondisi politik suatu daerah, maka sumber datanya adalah orang yang ahli politik.¹⁸

Populasi yang berada di DPC PKB Pesawaran berjumlah 21 orang Dewan Syura dan 19 orang Dewan Tanfidz. Sampel yang menjadi narasumber pada penelitian ini adalah dari ketua, sekretaris, dan bendahara partai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer dengan Wawancara.

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).¹⁹

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁰ wawancara dilakukan sebagai teknik

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 81.

¹⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*. h. 86.

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) Cetakan Ke-10, h. 72.

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik ini juga dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Tipe wawancara yang digunakan adalah tipe wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Sistematisasi Data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan pokok masalah.²¹

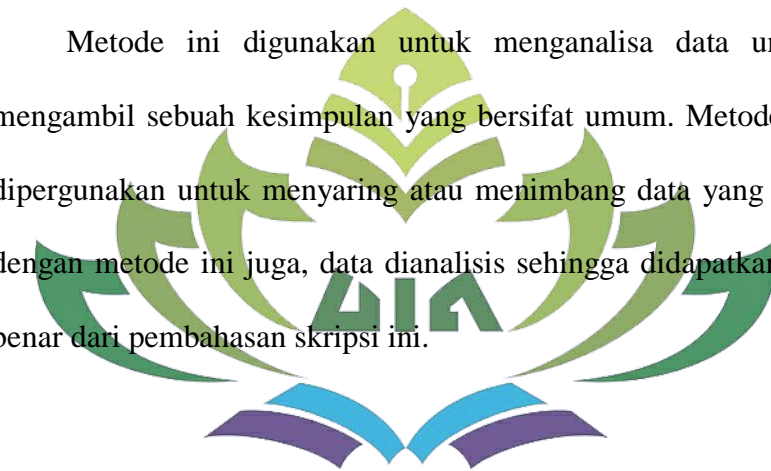
²¹ *Ibid*, h. 13.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.²²

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²³

Metode ini digunakan untuk menganalisa data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.



²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012) Cetakan Ke-17, h. 8.

²³ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 80.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Fikih Siyasah dan Ruang Lingkupnya

Fikih siyasah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu kata fikih dan kata siyasah. Secara etimologis, fikih merupakan bentuk masdar dari kata *faqih*-*yafqohu*-*fiqhan* yang memiliki arti pemahaman secara mendalam yang tepat dan sangat akurat sehingga dapat memahami apa yang ditujukan oleh sebuah ucapan atau tindakan tertentu.¹

Sedangkan fikih secara terminologis, lebih dikenal dengan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dapat dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci atau dari satu-persatu dalil. Maksudnya adalah setiap hukum dari perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fikih, itu memiliki masing-masing dalil dari perbuatan tersebut. Meskipun tidak semua dalilnya terperinci atau ada dalil yang masih bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih dalam.

Pengertian siyasah secara harfiah berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.² Sedangkan menurut Ahmad Fathi Bahantsi, pengertian siyasah adalah pengurusan kemashlahatan umat manusia yang dilakukan sesuai dengan syara'.³

¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 2.

² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2009), h. 25.

³ Ahmad Fathi Bahantsi, *As Siyasah al-Jinayah fi al-Syari'at al-Islamiyah* (Dar al-'Arubah), h. 61.

Menurut Ibn ‘Aqil siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemashlahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah saw tidak menetapkannya, dan Allah Swt tidak menentukannya.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang peraturan-peraturan kepentingan negara dan umat yang secara spesifik berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah yang memegang kekuasaan yang dilakukan sesuai dengan syari’at Islam. Ini dilakukan untuk kemashlahatan bagi umat manusia, dan menghindarkannya dari segala bentuk kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Objek kajian fikih siyasah meliputi beberapa aspek diantaranya yaitu aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara. Hubungan ini baik yang sifatnya intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, di dalam berbagai bidang kehidupan. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy menjeaskan bahwa objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan dan urusan-urusan mukallaf dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang tidak kita peroleh dalilnya, yang

⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbil ‘Alamin* (Beirut: Dar al-Jayl), h. 16.

khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap.⁵

Hal yang sama juga dari pada pernyataan Abul Wahab Khallaf. Ia mengemukakan bahwa objek pembahasan dari ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama, dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fikih siyasah, dalam tahap pengembangannya dikenal beberapa pembedangan kajian fikih siyasah. Dalam penelitian ini yang berkenaan dengan hubungan antar manusia menurut pengaturan fikih siyasah ada 3 (tiga) macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Fikih siyasah dusturiyyah (Peraturan perundang-undangan)

Siyasah dusturiyyah merupakan bidang kajian ilmu fikih siyasah yang membahas tentang undang-undang dasar suatu negara, yang isinya tentang bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara.⁷ Siyasah dusturiyyah juga mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.

⁵ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam* (Jakarta: Matahari Masa, 1976), h. 28.

⁶ Abd Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Wa Al-Syari'ah* (Kairo: Dar Ansor, 1977), h. 5.

⁷ Mujaer Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, h. 17.

b. Fikih siyasah dauliyyah (kedaulatan, kekuasaan, dan wewenang)

Siyasah Dauliyyah merupakan bidang kajian ilmu fikih siyasah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.⁸

c. Fikih siyasah maliyyah (ekonomi/moneter)

Siyasah Maliyyah merupakan bidang kajian ilmu fikih siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.⁹

2. Pengertian Anggota Perwakilan

Islam mengenal Anggota Perwakilan atau dengan sebutan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*. Istilah *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* mulai timbul pada kitab-kitab ahli tafsir dan ahli fikih setelah masa Rasulullah saw, yaitu pada masa sahabat Nabi saw. Banyak sebutan kelompok *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam *turats* fikih sejak awal Islam yaitu “Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)” atau *Ahlul Ikhtiyar*, yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat yang juga berkomitmen dengan pendapat mereka, dan mereka pun memiliki hak untuk memilih atau menobatkan khalifah, dan dapat pula memberhentikannya.¹⁰ Mereka terdiri dari para Ulama, para

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, h. 31.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Syaikh Khallaf, *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, 1931, h. 57.

pemimpin suku dan pemuka masyarakat, yang memiliki kekuasaan besar dan hal ini menunjukkan bahwa mereka merupakan lembaga legislatif.¹¹

Secara bahasa *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* terdiri dari tiga kata. *Ahlul*, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). *Halli*, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan. *'Aqdi*, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Para ahli fikih siyasah merusmuskan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan dalam memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat.¹² Dengan kata lain, *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi maupun suara masyarakat.

Menurut Farid Abdul Kholiq, *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* (*Ahlul Ikhtiyar*) yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka.¹³ Al-Mawardi juga menyebut *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dengan *Ahl al-ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah.¹⁴ Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutnya dengan *Ahl Al-Syaukah*, sebagian lagi menyebutkan dengan istilah *Ahl al-Syura* atau *Ahl al-Ijma'*.

¹¹ Ahmad Syalabi, *al-Hukumah wa ad-Dawlah fil Islam* (Maktabah an-Nadhah al-Mishriyyah), 1958, h. 28.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Predana Media Group, 2014), h. 137.

¹³ Farid Abdul Kholiq, *Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-'Adl Al-Musawah*, penj. Faturrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 108.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 138.

Ada pendapat beberapa ahli mengenai *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, yaitu:

- a. An-Nawawi dalam Al-Minhaj, mengatakan bahwa *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.¹⁵
- b. Muhammad Abduh menyamakan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dengan ulil amri yang disebut dalam Alquran surat An-Nisaa' ayat 59. Ia menafsirkan Ulil Amri atau *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat yang berasal dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik¹⁶. Lebih lanjut ia menjelaskan apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Sunnah Rasul yang mutawatir.
- c. Rasyid Ridha juga berpendapat bahwa Ulil Amri adalah *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*. Ia menyatakan bahwa kumpulan dari ulil amri atau disebut *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari berbagai ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para

¹⁵ Muhammad, *Dhiya al-Din al-rayis*, h. 170.

¹⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, h. 181.

pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan.¹⁷

d. Al-Razi juga memberi pengertian yang sama antara *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* dan ulil amri yaitu para pemimpin dan penguasa.¹⁸

e. Al-Mawardi merumuskan beberapa syarat bagi *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, yaitu harus berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan dan memiliki wawasan dan kearifan.¹⁹

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah orang-orang yang memiliki jabatan sebagai anggota perwakilan (anggota legislatif) yang berwenang untuk menetapkan kepala negara berdasarkan ijtihad, dan memenampung serta menyalurkan aspirasi maupun suara dari masyarakat.

3. Sejarah Terbentuknya Lembaga Perwakilan

Sejarah terbentuknya lembaga perwakilan dalam Islam atau yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah berawal dari masa pemerintahan Bani Umaiyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-967 M) membentuk majelis As-Syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan

¹⁷ Muhammad, *Dhiya al-Din al-rayis*, h. 167-168.

¹⁸ Muhammad Al-Razi, Fakhr al-Din bin Dhiya al-Din Umar, *Tafsir Fakhr al-Razi*, Jilid V, *Dar al-Fikr*, h.149

¹⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-sulthaniyyah; Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, h. 6.

perintah negara. Sehingga daulat Baniy Umaiyah II di Spanyol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus.²⁰

Bibit konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pertama kali muncul dalam masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, sebelum kewafatannya menunjuk enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk memilih Khalifah setelah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqash, Abdu al-Rahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah serta Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar hanya bertindak sebagai penasihat, dan tidak berfungsi sebagai calon.²¹

Istilah *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari umat. *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah orang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan

²⁰ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah* (Mesir: Dar al-fikr, 1996) h. 24-25.

²¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.28.

kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.²²

Seperti pendapat Rasyid Ridha yang dikutip Suyuthi, *ulil amri* adalah *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*. Ia menyatakan: “Kumpulan *ulil amri* dan mereka yang disebut *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan. Al-Razi juga menyamakan pengertian antara *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dengan *ulil amri*, yaitu para pemimpin dan penguasa. Demikian juga Al-Maraghi yang sependapat dengan apa yang diungkapkan Rasyid Ridha.²³

Dari mulai masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, semua masalah yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat apabila ia tidak menemukan penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan hadist maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika mereka semua sepakat atas satu keputusan, maka dia pun memutuskan permasalahan tersebut sesuai hasil musyawarah tadi. Begitu pula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia mempunyai orang-orang khusus dari pada *ulil amri* yang disebut sebagai *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* untuk

²² Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 66-67.

²³ *Ibid*, h. 69.

melaksanakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat.²⁴

Intuisi musyawarah diwujudkan oleh khalifah Umar bin Khattab menjadi majelis atau lembaga tertinggi sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya. Setiap keputusan dan peraturan yang dibuat pada masa pemerintahannya diproses melalui musyawarah. Pada masa pemerintahannya dibentuk dua badan penasehat atau *syura*. Badan penasehat yang satu merupakan sidang umum, yang diundang bersidang bila Negara menghadapi bahaya. Sedang yang lainnya adalah badan khusus yang membicarakan masalah rutin dan penting. Bahkan masalah pengangkatan dan pemecatan pegawai sipil serta lainnya dibawa ke badan khusus ini dan keputusannya dipatuhi.²⁵

Khalifah Umar mempunyai satu cara musyawarah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu terkadang apabila ia menghadapi suatu masalah pertama ia bawa ke sidang musyawarah umum yang dihadiri oleh kaum muslimin untuk mendengarkan pendapat mereka. Kemudian masalah yang sama ia bawa ke sidang khusus yang dihadiri oleh para sahabat nabi yang senior dan sahabatsahabat cendikiawan untuk mendengarkan pendapat mereka yang terbaik.

Umar juga pernah mengizinkan penduduk bermusyawarah untuk memilih calon yang pantas dan jujur menurut pendapat mereka. Hal ini

²⁴ Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*. (Jakarta: Amzah, 2005), h. 78-79.

²⁵ *Ibid*, h. 83.

terjadi ketika ia hendak mengangkat pejabat pajak untuk Kufah, Basrah dan Syria.²⁶

Setelah Umar wafat, lembaga Syura yang dibentuk oleh Umar segera melakukan rapat untuk menentukan pengganti Umar sesuai dengan amanah Umar bin Khattab. Utsman dalam memerintah juga mengedepankan musyawarah namun tindakannya cenderung menjurus nepotisme sehingga menjadi bumerang bagi dirinya sendiri di kemudian hari. Hanya pada saat pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah untuk menggantikan Utsman lembaga Syura yang dibentuk oleh Umar tidak lagi mengadakan musyawarah, namun pengangkatan Ali dilakukan melalui musyawarah oleh orang terdekat dengan keluarganya, namun dalam pemerintahannya Ali juga mengedepankan musyawarah sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulunya.²⁷

Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari umat. Dengan demikian, *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian

²⁶ Sayuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 124-125.

²⁷ *Ibid*, h. 150.

yang berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin informal. Tidak semua pemimpin dan pemuka profesi dan keahlian yang disebut otomatis adalah anggota dari *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, sebab anggota lembaga ini harus memenuhi kualifikasi. Al-Mawardi dan Rasyid Ridha merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku adil dalam setiap sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan, dan memiliki wawasan dan kearifan. Dengan kualifikasi ini diharapkan golongan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dapat menentukan siapa diantara ahl al-imamat yang pantas menjadi kepala negara menurut syarat-syarat yang ditentukan, dan mampu memegang jabatan itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.²⁸

Begitu pula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia mempunyai orang-orang khusus dari pada ulil amri yang disebut sebagai *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* untuk melaksanakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat.²⁹

Secara realita, masalah kelompok *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dan pemilu adalah seperti masalah “kekhalifahan” sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun yakni termasuk kemaslahatan umat yang semua pengaturannya diserahkan kepada rakyat. Hal ini tidak termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah dan keyakinan. Dalam bukunya Farid Abdul Khaliq memastikan bahwa kelompok *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*

²⁸ Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 69-70

²⁹ Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*, h. 78-79.

yang sering dipakai dalam istilah turats fikih sejak awal Islam adalah mereka “Dewan Perwakilan Rakyat” atau yang biasa disebut Ahlul Ikhtiyar, yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka, dan mereka mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah juga memberhentikannya. *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi* terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat yang menguatkan mereka sebagai lembaga legislatif.³⁰

Lembaga Perwakilan atau yang disebut dengan *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi*, memiliki dasar hukum dari al-Qur’an dan hadis. Ada beberapa prinsip yang mendasari terbentuknya suatu kekuasaan yang dijadikan sebagai landasan untuk membuat kebijakan dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip atau dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut:

Firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa’ [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.³¹ (Q.S. An-Nisa’ [4]: 58)

Secara hukum, diakui bahwa seorang faqih yang adil, adalah yang mampu untuk menengahi perselisihan-perselisihan dan memutuskan

³⁰ Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik*, h. 79.

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 72.

perkara-perkara hukum yang terjadi.³² Begitupun dalam memilih seorang pemimpin haruslah dipilih orang yang adil.

Firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³³ (Q.S. An-Nisa' [4]: 59)

Ayat ini menjelaskan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dalam al-Qur'an telah ditetapkan sebuah prinsip yang disebut dengan prinsip ketaatan rakyat.

Menurut Hazairin, kata “menaati Allah Swt” memiliki arti tunduk dan patuh kepada semua yang telah menjadi ketetapan-Nya, sedangkan “menaati Rasul” berarti tunduk dan patuh pada ketetapan-ketetapan Rasulullah saw. Sedangkan kata “menaati Ulil Amri” berarti tunduk terhadap ketetapan-ketetapan para pemegang kekuasaan dalam lingkungan kekuasaannya.³⁴

³² Ahmed Vaezi, *Agama Politik Nalar politik Islam*, (Jakarta: Citra, 2006), h. 88.

³³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 73.

³⁴ Muhammad Tahir Azhari, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenamedia, 2012), h. 153.

Menurut Al-Maududi, selain Q.S. An-Nisa[4]: 59 tersebut di atas, mengenai dasar pembentukan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, ia juga mengacu pada firman Allah Swt dalam Q.S. Asy-Syura [42]: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Ikhlâs [112]: 1-4:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Artinya: “(1) Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa, (2) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, (3) Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, (4) dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” (Q.S. Al-Ikhlâs [112]: 1-4)

Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 163:

وَاللَّهُمُّ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Artinya: “Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”³⁵ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 163)

Hadis Rasulullah saw yang menjadi dasar pembentukan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah sebagai berikut:

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي , وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي , فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي , وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتُهُ مَالٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ , وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى بَشِيرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا , وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا , وَإِنْ أَتَانِي بِمَشْيٍ أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً .

Artinya: “ dari Abu Hurairah r.a., ia berkata bahwa Nabi saw bersabda, “Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku saat bersendirian, Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku di suatu kumpulan, Aku akan mengingatnya dikumpulan yang lebih baik daripada itu (kumpulan malaikat). Jika ia mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku mendekat padanya sehasta. Jika ia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan (biasa), maka Aku mendatangnya dengan berjalan cepat.” (HR. Bukhari)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut di atas diketahui bahwa pembentukan *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi* sangat diperlukan dalam pemerintahan. Ini karena banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara adil dan bijaksana, sehingga tercipta kemashlahatan untuk semua umat.

Khalid Ali Muhammad al-Anbari berpendapat bahwa Ulil Amri termasuk di dalamnya *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi* memiliki 6 (enam) tugas pokok yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:³⁶

³⁶ Khalid ‘Ali Muhammad al-Anbari, *Sistem Politik Islam Menurut Al-Qur’an, Sunnah dan Pendapat Ulama Salaf*, terjemahan dari *Fiqh al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Daw’I Al-Qur’an wa Al-Sunnah wa Aqwal Salaf Al-Ummah*, (Kuala Lumpur: Telag Biru Sdn, 2008) Cet. I, h. 190-197.

a. Tugas di bidang keagamaan

Ada beberapa tugas *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam bidang keagamaan, yaitu:

- 1) Mengembangkan ilmu-ilmu agama;
- 2) Menghormati ahli-ahli ilmu agama;
- 3) Meminta pandangan para ahli agama dalam permasalahan hukum yang menyangkut masalah keagamaan;
- 4) Menjadi imam dalam shalat;
- 5) Menyampaikan khutbah;
- 6) Mendukung tegaknya syiar-syiar Islam. Misalnya memberi dukungan untuk dikumandangkannya adzan dan iqamah sebagai penanda bahwa telah masuknya waktu sholat di berbagai masjid dan mushola;
- 7) Memberantas bid'ah dan mengambil tindakan dalam undang-undang sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap orang yang mengamalkannya. Ini dilakukan untuk memelihara agama dari kecacatan dan melindungi umat Islam dari kesesatan;
- 8) Menentukan permulaan dan akhir pelaksanaan ibadah puasa;
- 9) Menyediakan kemudahan bagi penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah.

b. Tugas di bidang kehakiman

Ada beberapa tugas *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam bidang kehakiman, yaitu:

- 1) Menegakkan keadilan dan memberantas kedzaliman;

- 2) Melaksanakan hudud atau hukum syari'ah agar segala larangan Allah Swt tidak disepelekan dan hak-hak manusia tidak dilanggar;
- 3) Memisahkan kekuasaan eksekutif daripada kekuasaan yudikatif dengan melantik pejabat dan hakim yang mampu mengemban tugas untuk mencegah terjadinya pertikaian dan kedzaliman. Sehingga semua pihak, baik pihak yang kuat maupun pihak yang lemah, ataupun pihak yang hina dan pihak yang mulia memiliki kedudukan yang setara dihadapan hukum.

c. Tugas di bidang pemerintahan negara

Tugas *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam bidang pemerintahan negara, yaitu:

- 1) Memilih mereka yang mampu dan layak untuk melakukan tugas-tugas yang berkepentingan dengan orang banyak, khususnya kaum muslim. Sehingga tugas yang diserahkan kepadanya dapat diemban dengan sebaik-baiknya;
- 2) Mengontrol pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan kepentingan umat. Sehingga dapat segera diketahui jika ada pihak-pihak yang melakukan penipuan atau pengkhianatan.

d. Tugas di bidang keuangan

Ada beberapa tugas *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* di bidang keuangan, yaitu:

- 1) Memungut dan mendistribusikan zakat, *jizyah*, *kharaj* dan *fai*;

- 2) Memberikan perhatian kepada harta-harta yang telah diwaqafkan untuk tujuan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

e. Tugas di bidang pertahanan

Ada beberapa tugas *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dibidang pertahanan, yaitu:

- 1) Berjihad dalam menentang dan membentengi kaum muslimin dari kaum musyrikin yang memusuhi Islam;
- 2) Memerangi pemberontakan dan membentuk angkatan bersenjata yang tangguh. Termasuk menetapkan gaji dan tunjangan yang memadai, sehingga tentara yang tergabung dalam angkatan bersenjata itu dapat hidup layak dengan gaji yang diterimanya.

f. Tugas untuk merealisasikan kehidupan yang baik untuk setiap individu rakyat dalam berbagai dimensi.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada 2 (dua) tugas penting yang harus diemban oleh *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*. Beliau mengemukakan bahwa tugas-tugas *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah sebagai berikut:

- a. Tugas *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah mencalonkan dan memilih, serta melantik calon khalifah dan memberi baiat in'iqad kepada khalifah. Imam al-Mawardi berkata bahwa, “Jika *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* telah berkumpul untuk memilih, maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan Imamah (Khilafah), yang memenuhi seluruh persyaratannya. Mereka harus mendahulukan yang paling banyak

kelebihannya, yang paling sempurna persyaratannya, dan yang paling segera ditaati rakyat, tanpa bergantung pada pembaiatannya”.

- b. Tugas lain dari *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah melakukan ijtihad terhadap permasalahan-permasalahan yang hukumnya tidak secara tegas dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya al-sulthah al-tasyriyyah tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa, untuk mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Selain itu ijtihad dari *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* atau anggota legislatif harus mengacu pada prinsip *Jabl al-Mashalih Daf' al-Mafasid* (mengambil mashlahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi dari sosial masyarakat. Hal ini dilakukan agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.³⁷

Sedangkan Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah, menyatakan bahwa tugas Ulil Amri yang termasuk didalamnya *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* ada 10 (sepuluh), diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mempertahankan dan memelihara agama;
- b. Menegakkan hukum dan keadilan terhadap pihak-pihak yang berperkara;
- c. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Allah Swt;
- d. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh;

³⁷ Abd al-Qahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*, (al-Qahiran: Mathba'ah al-Taqaddum, 1977), h. 59.

- e. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman, baik jiwa maupun hatinya;
- f. Melaksanakan jihad untuk menghadapi pihak-pihak yang memusuhi Islam;
- g. Memungut zakat, pajak dan mendistribusikannya kepada yang berhak;
- h. Mengatur penggunaan harta kas negara (bayt al-mal) secara efektif;
- i. Melantik orang yang jujur dan berkualitas untuk mengurus keuangan negara;
- j. Memantau pekerjaan pejabat dalam rangka pembangunan negara dan untuk menjaga agama.³⁸

Berdasarkan keterangan dari beberapa pakar hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dari lembaga perwakilan atau *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah memilih dan menentukan khalifah atau pemimpin negara, dan menjalankan kebijakan pemerintah sesuai dengan syari'at Islam.

Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *Ahlul Halli wal 'Aqdi* mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki kapabilitas untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Mawardi “apabila *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* berkumpul untuk memilih, mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria, lalu mereka mengajukan orang yang

³⁸ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1996) h. 26.

terbaik dan paling sempurna kriterianya untuk disumpah. Mengajak rakyat untuk taat kepadanya dan tidak menahan diri dari pembaiatannya”.³⁹

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Harmalah, beliau berkata :

سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : كُلُّ مَنْ غَلَبَ عَلَى الْخِلَافَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُسَمَّى خَلِيفَةً، وَيَجْمَعُ
النَّاسَ عَلَيْهِ، فَهُوَ خَلِيفَةٌ

Artinya: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata: “Siapapun yang menang dalam merebut kekhalifahan (kekuasaan) dengan pedang, lalu disebut khalifah, dan manusia bersepakat (atas kepemimpinan)-nya, maka orang itu adalah khalifah (yang wajib untuk ditaati).”⁴⁰

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.⁴¹

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

مَنْ أَرَادَ أَمْرًا فَشَاوَرَ فِيهِ إِمْرًا مُسْلِمًا وَفَقَّهُهُ اللَّهُ لِإِرْشَادِ أُمُورِهِ

³⁹ Al- Mawardi, *Al- Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah*, (Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 39

⁴⁰ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Wijaya, 1996), h. 96

⁴¹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 80

Artinya: Barang siapa bermaksud sesuatu, dari bermusyawarah dengan seorang muslim maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya sehingga masalahnya akan berhasil sukses.⁴²

4. Syarat-syarat Menjadi Bakal Calon Anggota Perwakilan

Mengingat pentingnya kedudukan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, maka Al-Mawardi menentukan syarat-syarat sebagai anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*. Yakni harus memenuhi tiga syarat berikut ini:

أ. أَلْعَدَالَةُ الْجَامِعَةُ لِشُرُوطِهَا

ب. أَلْعِلْمُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا

ت. أَلرَّأْيُ وَالْحِكْمَةُ الْمُؤَدِّيَانِ إِلَى اخْتِيَارِ مَنْ هُوَ لِلْإِمَامَةِ أَصْلَحُ وَبِتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ أَقْوَمُ

وَأَعْرَفُ⁴³

Artinya :

- Memiliki sifat 'Adil yang mencakup semua syarat-syaratnya;
- Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri Imam tersebut;
- Memiliki pendapat (ra'yu) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi Imam serta paling kuat dan pandai mengurus kemaslahatan.

⁴² Ibnu Katsir, *Tartib wa Tahdzib Al-Kkitab bidayah wan Nihayah*, (Terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*), (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 284.

⁴³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayatu al-diniyyah*, (Beirut: Darul Fikr, 1960), h. 6.

Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi harus mempunyai kredibilitas pribadi yang tinggi, ia juga mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya serta bijaksana sehingga dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Dengan persyaratan-persyaratan tersebut diharapkan mereka mampu menghasilkan keputusan yang benar-benar memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi umat.

Di Indonesia, seseorang yang akan menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Warga Negara Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia.

Persyaratan ini tidak bermaksud untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk

⁴⁴ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 184-187.

melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- e. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
- f. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Yang dimaksud setia dalam hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota DPR dan DPRD yang bersangkutan dengan diketahui oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya.

- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- h. Sehat jasmani dan rohani.

Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- i. Terdaftar sebagai pemilih.
- j. Bersedia bekerja sepenuh waktu.
- k. Mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada BUMN/BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari

keuangan negara, yang dinyatakan dengan serat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.

- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Politik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sesuai peraturan perundang-undangan.
- m. Menjadi anggota Partai Politik peserta Pemilu.
- n. Dicalonkan hanya 1 (satu) Lembaga Perwakilan.
- o. Dicalonkan hanya 1 (satu) daerah pemilihan.

Untuk membuktikan persyaratan tersebut di atas, seorang bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memerlukan kelengkapan administrasi yang terdiri dari:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Akte Kelahiran Warga Negara Indonesia.
- b. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisir oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
- c. Surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara RI setempat.
- d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani.

- e. Surat tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih.
- f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja sepenuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
- g. Surat pernyataan kesediaan tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Konsultan, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
- h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, pegawai pada BUMN/BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- i. Kartu Tanda Anggota Partai Politik peserta Pemilu.
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) Lembaga Perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Daerah Pemilihan, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

5. Mekanisme Penetapan Bakal Calon Anggota Perwakilan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam berbagai tingkatan baik itu pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan lembaga negara yang

memiliki peranan penting dalam mengawal serta menjalankan proses demokratisasi dan proses penyelenggaraan ketatanegaraan. Lembaga legislatif memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, untuk membentuk Undang-undang, fungsi *Budgeting* untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik negara maupun daerah, dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar menjamin terwujudnya hak-hak konstitusional warga negara sehingga prinsip *checks and balances* dalam sistem yang demokratis dan konstitusional senantiasa dapat terjaga.

Begitu pentingnya peran anggota legislatif bagi keberlangsungan iklim demokrasi di negara kita membuat proses rekrutmen dari anggota legislatif ini turut menjadi penting karena baik buruknya anggota legislatif yang duduk di parlemen akan ditentukan oleh proses rekrutmen yang terjadi di internal partai. Partai politik memainkan peranan penting dalam proses rekrutmen Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) yang nantinya akan duduk di parlemen karena rekrutmen Politik merupakan salah satu fungsi dari keberadaan partai politik. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh partai politik untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan rekrutmen politik. Ada yang melakukan rekrutmen politik dengan cara memasang iklan terbuka dengan berbagai media layaknya sebuah perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja cara ini mulai banyak digunakan oleh partai politik untuk menjaring Bacaleg dari luar partai.

Proses penetapan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimulai melalui seleksi internal Partai Politik

peserta Pemilu. Seleksi ini dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik yang bersangkutan. Berdasarkan hasil seleksi, Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan menyusun daftar bakal calon. Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh Pengurus Pusat Partai Politik yang bersangkutan, sedangkan daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat Provinsi, dan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota. Dalam daftar bakal calon tersebut, memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) perwakilan perempuan. Setiap 3 (tiga) prang bakal calon, terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang calon perempuan. Daftar bakal calon dimaksud, dapat memuat sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan.⁴⁵

Nama besar partai membuat masyarakat yang menginginkan menjadi wakil rakyat, mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dari partai tersebut dengan harapan dapat memperoleh suara terbanyak pada pemilihan umum. Banyaknya bakal calon legislatif yang mendaftarkan diri, membuat proses penetapan calon legislatif cukup ketat. Seleksi yang ketat tersebut dapat menimbulkan cara-cara yang tidak benar dalam memperoleh nominasi sebagai calon legislatif, seperti hubungan kedekatan antara elit partai, loyalitas calon terhadap faksi tertentu, bahkan kekuatan finansial dari

⁴⁵ *Ibid*, h. 187-188.

kandidat. Akibatnya, bakal calon legislatif yang memiliki kompetensi dan komitmen, namun tanpa dana yang memadai atau kedekatan dengan petinggi partai politik akan tersingkir.

Kursi legislatif memang tidak pernah sepi peminat walaupun untuk memperolehnya harus dengan cara haram yang dikenal dalam kamus korupsi politik yaitu *Candidacy Buying* atau dalam istilah umum “membeli nominasi”. Hal ini yang menjadi mata air bencana yang menyebabkan citra legislatif semakin buruk karena kerap tersangkut korupsi. Hal ini disebabkan karena cara memperoleh kekuasaan sebagai wakil rakyat diperoleh dengan biaya besar dan dengan cara yang koruptif pula. Setidaknya jika ingin menjadi bakal Calon Legislatif (Caleg), harus memiliki biaya deposit minimal Rp 100 Juta, sedangkan dana kampanye berkisar hingga miliaran rupiah. *Candidacy buying* atau membeli rekomendasi yaitu politisi berupaya untuk direkomendasikan menjadi calon anggota legislatif atau eksekutif dengan cara membayar atau mengimingimingi elit partai. Proses jual beli rekomendasi ini bermula dari dua belah pihak baik tawaran dari elit partai maupun calon yang tidak percaya diri karena minimnya kapasitas sebagai wakil rakyat.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan politikus salah satu partai politik yang menyatakan bahwa:

Bacaleg yang memiliki modal besar akan cenderung menggunakan cara-cara transaksional dengan biaya yang bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Cara-cara inilah yang merusak tradisi politik dan pola pikir rakyat

sebagai pemilih dengan menjadikan faktor uang sebagai preferensi menentukan pilihan dalam pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, bisa diartikan bahwa dalam proses penetapan bakal calon anggota legislatif pada partai politik masih belum bisa sebagaimana diharapkan, demokratis dan partisipatif. Maka dari itu diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi aktivitas partai politik serta pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan para wakil rakyat tersebut. Masyarakat harus benar-benar cerdas memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi legislatif. Masyarakat harus aktif mencari informasi tentang calon legislatif yang akan dipilih, baik dari segi kepribadian, kualitas, loyalitas, hingga faktor-faktor apa saja yang menentukan kandidat tersebut menjadi seorang calon legislatif. Dengan memperhatikan kualitas proses penetapan bakal calon legislatif, masyarakat dapat menilai dan menduga kualitas partai politik yang terkait, politisi yang bakal berkarya di badan legislatif, serta dampaknya proses pembuatan kebijakan, dan implikasinya terhadap kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh sebagai *outcomes* dari sistem politik demokrasi. Jika salah satu dari mata rantai proses politik dalam jalur legislatif ini rusak maka bisa diperkirakan bahwa produk-produknya pun akan terimbas termasuk kemampuan dan kualitas produk tersebut dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Selain itu, partai politik seharusnya bersifat terbuka dalam proses penetapan bakal calon legislatif, sehingga masyarakat dapat

menilai calon wakil rakyat tersebut layak atau tidak untuk dipilih pada pemilihan umum.

Mekanismenya tentu saja setiap partai berbeda dan mempunyai pola masing-masing, akan tetapi ini adalah prinsip proses seleksi pencalegan harus dilalui melalui mekanisme yang terbuka, transparan dan demokratis serta merupakan bagian dari upaya pengkaderan. Mereka yang sudah terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif Partai harus diberikan pengarahan dan pembekalan dalam sebuah acara pendidikan dan latihan (diklat), yang di dalamnya diberikan materi-materi yang dibutuhkan mengenai partai politik, sistem politik di Indonesia, undang-undang partai politik. Kedudukan tugas dan fungsi lembaga legislatif mulai DPR-RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, ideologisasi Pancasila dan NKRI, materi tentang gerakan antikorupsi, dan berbagai materi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kampanye yang melibatkan berbagai media massa termasuk media sosial sebagai alat dalam melakukan sosialisasi dan kampanye begitu juga mereka para bakal calon akan dikenalkan dengan orang-orang divisi tim sukses yang mana akan membawa para bakal calon untuk siap menghadapi masyarakat juga dengan pengarahan proses pemenangan.

Proses selanjutnya tentu saja panitia tim penjaringan akan melihat rekam jejaknya bakal calon-calon legislatif tersebut, melakukan wawancara untuk mengetahui kedalaman wawasan, mengetahui kemampuan presentasi dan argumentasi di dalam menyampaikan suatu isu, mengetahui latar

belakang aktivitas di masa lalu, serta juga dilakukan tes psikotes dan psikologi untuk mengetahui kepribadiannya.

Termasuk pula tim penjaringan harus mengetahui bagaimana elektabilitas dan popularitas sebagai bagian dari pengujian kelayakan menjadi calon legislatif dengan melakukan survei internal di daerah pemilihan masing-masing. Kemudian, penilaian tentang kapasitas dan prestasi profesionalnya dibidangnya masing-masing, penilaian mengenai dedikasi dan loyalitas terhadap negara, masyarakat dan partai politik serta mempunyai kepribadian dan rekam jejak kehidupan yang tidak tercela baik yang menyangkut tindak pidana korupsi maupun tidak tercela.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang. Topik utama yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah penetapan bakal calon anggota legislatif khususnya pada DPC PKB Kabupaten Pesawaran, kemudian ditinjau menurut Fikih Siyasah. Sebelumnya penelitian tentang calon anggota legislatif telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi penelitian tentang penetapan bakal calon anggota legislatif pada DPC PKB Kabupaten Pesawaran belum pernah dilakukan. Adapun penelitian yang membahas tentang calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa yang telah dilakukan sebelumnya yang pernah penulis temukan, antara lain yaitu:

1. Abdul Hadi, dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen Pengkaderan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016 dalam Rangka Pendidikan Politik Calon Anggota Legislatif Partai (Telaah Fungsi Perencanaan dan Pengawasan)”, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Penelitiannya membahas tentang bagaimana penerapan fungsi perencanaan dan pengawasan pada pengkaderan calon anggota legislatif dalam rangka pendidikan politik. Studi dalam penelitian ini dilakukan pada DPW Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011-2016.⁴⁶
2. Yuni Famelia, dalam skripsinya yang berjudul “Pola Pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Kualitas Berpolitik (Studi pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandar Lampung)”, Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017. Penelitiannya membahas tentang bagaimana pola pengkaderan yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Bandar Lampung. Penelitiannya juga membahas tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengkaderan calon anggota legislatif pada DPC PKB Kota Bandar Lampung.⁴⁷

⁴⁶ Abdul Hadi, *Manajemen Pengkaderan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016 dalam Rangka Pendidikan Politik Calon Anggota Legislatif Partai (Telaah Fungsi Perencanaan dan Pengawasan)*, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015.

⁴⁷ Yuni Famelia, *Pola Pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Kualitas Berpolitik (Studi pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandar Lampung)*, Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017.

3. Redhi Nopriandi Gustam, dalam skripsinya yang berjudul “Kaderisasi Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Lampung”, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2019. Penelitiannya membahas tentang bagaimana cara pengkaderan perempuan yang dilakukan oleh DPW PKB Provinsi Lampung agar berkualitas, berkompeten, dan mampu bersaing dalam dunia perpolitikan.⁴⁸

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini lebih fokus terhadap penetapan bakal calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Pesawaran.
2. Lokasi dan objek penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di DPC PKB Kabupaten Pesawaran.

⁴⁸ Redhi Nopriandi Gustam, *Kaderisasi Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Lampung*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Alhafidz, Ahsin W. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah,
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, Sutrisno. 1983. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Haricahyono, Cheppy. 1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya* Cet. Ke-2. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Cetakan 7. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Margono. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. 1996. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Cetakan Ke-17. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kulitatif* Cetakan Ke-10. Bandung: Alfabeta.
- Zuhro, Siti, dkk 2009. *Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak,